

KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI DEMOKRAT PASCA PILKADA RIAU 2013

Rico Purnawandi Pane

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Mapping of relationships and interactions between boards, cadres and members are the three elements that determine how the party consolidation can be realized, as well as the driving force of the internal and external dynamics of political parties. If an internal party is institutionalized, a party is supposed to be half way to interact and compete in a party system. This study aims to see the institutionalization of the Democrat Party of Riau Province after the elections of Riau in 2013. The analysis in this study uses the institutional theory of Larry Diamond and Richard Gunther and conducted with qualitative methods. This research show that the problems that exist in the Democrat Party of Riau is a very complex issue because the culture and the mechanism of democracy are not carried out consistently. The emergence of internal party factions is the initial turmoil of political turmoil in the party's internal. Then aggravated by the non-run of cadreization so that impact on cadre loyalty development. The emergence of factions and non-implementation of the regeneration shows that the institutionalization of the democrat party has not gone well. Other than that, the lack of cadre data base, unclear financial resources and lack of coordination agenda and consolidation of the party shows that the democrat party has not been organizational enough.

Abstrak: Pemetaan relasi dan interaksi antara pengurus, kader dan anggota merupakan tiga elemen yang menentukan bagaimana konsolidasi partai dapat terwujud, sekaligus motor penggerak dari dinamika internal maupun eksternal parpol. Jika internal partai terinstitusionalisasi, sebuah partai ibaratnya telah berada setengah jalan untuk bisa berinteraksi dan berkompetisi dalam sebuah sistem kepartaian. Studi ini bertujuan untuk melihat institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Riau pasca Pilkada Riau tahun 2013. Analisis dalam studi ini menggunakan teori kelembagaan Larry Diamond dan Richard Gunther dan dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masalah yang ada pada Partai Demokrat Riau merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena budaya dan mekanisme demokrasi tidak dijalankan secara konsisten. Timbulnya faksi-faksi di internal partai merupakan gejolak awal kegaduhan politik di internal partai. Kemudian diperparah dengan tidak berjalannya kaderisasi sehingga berdampak pada bangunan loyalitas kader. Timbulnya faksi-faksi dan tidak berjalannya kaderisasi itu menunjukkan bahwa institusionalisasi partai demokrat belum berjalan dengan baik. Selain itu tidak adanya data base kader, sumber daya finansial yang kurang jelas dan kurang berjalannya agenda koordinasi dan konsolidasi partai menunjukkan partai demokrat belum tangguh secara organisasional.

Kata Kunci: Partai Demokrat, pelembagaan, konsolidasi

PENDAHULUAN

Partai-partai politik di Indonesia masih jauh dari pelembagaan, ketidakterlembaganya partai politik ini mayoritas tampak dari terlalu dominannya figur *top leader* bahkan sejak awal kelahirannya. Sebagai contoh, partai-partai yang terlahir pada periode pemilu masa awal reformasi (1999), semisal PDI Perjuangan atau PDI-P (Megawati Soekarnoputri), PKB (Gus Dur), PAN (Amin Rais). Kemudian partai-partai yang lahir dan sebagai peserta pemilu 2004 – 2014: Partai Demokrat (SBY), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Nasdem (Surya Paloh), Hanura (Wiranto). Dan, menghadapi pemilu 2019, kemunculan Partai Perindo yang didirikan oleh Harry

Tanoesudibjo pun menunjukkan gejala yang sama. Mereka memulai dari figur *top leader* yang kemudian menjadi simbol partai. Selain isu dominannya *top leader*, gejala belum melembaganya partai politik tampak dari kegagalannya mengelola konflik internal dan kepentingan faksi-faksi dalam tubuh partai.

Gejala itu nyatanya juga merembes ke tingkat pengurusan partai politik di daerah. Partai Demokrat sebagai salah satu partai politik yang lahir pada periode reformasi diyakini juga menghadapi situasi kelembagaan partai politik yang sama. Ketergantungan pada figur *top leader* telah mendistorsi Partai Demokrat kearah yang tidak sehat khususnya pada tingkatan daerah

(baca-DPD Partai Demokrat Provinsi Riau) sehingga keberlangsungan institusionalisasi partai menjadi terganggu.¹

Studi Rendra tentang Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau Tahun 2004-2009 mengungkapkan bahwa konflik internal di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang ditandai oleh pergeseran kekuasaan politik pada pimpinan partai dikarenakan tidak adanya pimpinan partai yang murni kader partai terutama sejak pengambilalihan posisi ketua DPD PD oleh Thamsir Rahman pada tahun 2007. Pasca pemilihan Gubernur Riau tahun 2008 posisi Thamsir sebagai ketua DPD PD Provinsi Riau terusik. Kekalahan Thamsir pada Pilgubri tahun 2008 dituduh sebagai penyebab beralihnya dukungan pengurus untuk melengserkan Thamsir dari posisi ketua umum. Klimaksnya adalah pada pertengahan tahun 2009 Thamsir dilengserkan dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang dipelopori oleh DPC-DPC dan beberapa pengurus di DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

Pasca dilengserkannya Thamsir dari kursi ketua DPD Partai Demokrat, muncullah nama Zulkifli AS (atau biasa dipanggil Zul AS) sebagai pimpinan Partai Demokrat Provinsi Riau. Zul AS terpilih dalam musyawarah daerah luar biasa Partai Demokrat Provinsi Riau pada tahun 2009. Zul kemudian dilantik sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau menggantikan HR. Thamsir Rahman yang digulingkan dalam musyawarah daerah luar biasa. Terakhir adalah pasca kalahnya Zul AS dalam kontestasi pemilihan walikota Dumai pada tahun 2010, Zul AS tiba-tiba mengundurkan diri dari kursi ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Keputusan pengunduran diri Zul AS tentu saja mengejutkan banyak pihak sebab tanpa alasan yang jelas Zul AS mengundurkan diri dari jabatan ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Pasca mundurnya Zul AS, akhirnya dilaksanakan musyawarah daerah Partai Demokrat pada pertengahan tahun 2010 yang akhir-

nya menetapkan HR. Mambang MIT sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau untuk periode 2010-2015. Dari studi Rendra itu jelas terlihat bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang dijalankan oleh DPD PD Provinsi Riau belum berjalan.²

Partai Demokrat yang memiliki kursi terbanyak kedua di DPRD Provinsi Riau tentu saja menjadi daya tawar dan daya tarik yang tinggi bagi para kandidat Calon Gubernur maupun Wakil Gubernur untuk memanfaatkan perahu Partai Demokrat maju pada helat Pilkada Provinsi Riau. Perebutan rekomendasi untuk maju menjadi Calon Gubernur dari Partai Demokrat itu berlangsung cukup lama walaupun pada akhirnya dengan berbagai dinamika yang berkembang DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberi rekomendasi kepada Ahmad (Ketua DPD PD Rokan Hulu/Bupati Rohul) untuk maju sebagai Calon Gubernur dari Partai Demokrat dan mengabaikan HR. Mambang Mit yang waktu itu menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan juga Wakil Gubernur Riau.

Turunnya rekomendasi kepada Ahmad benar saja menimbulkan perpecahan di internal DPD PD Provinsi Riau dan DPC-DPC Se-Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan kurang puasnya beberapa kader terhadap keputusan DPP Partai Demokrat yang merekomendasikan Ahmad. HR. Mambang Mit sehari setelah pengumuman rekomendasi DPP langsung mengundurkan diri dari posisi ketua sekaligus anggota Partai Demokrat. Kontan saja situasi itu juga berimbang pada kondisi internal DPD PD Provinsi Riau dalam menghadapi Pilkada Riau 2013 dan Pemilu 2014. Ahmad yang mendapatkan rekomendasi partai akhirnya juga ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat. Kegaduhan elit itu, benar saja berdampak pada kepengurusan partai di tingkat bawah, banyak loyalis Mambang Mit yang secara tegas menolak keputusan DPP demikian halnya dengan para Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat yang telah disusun oleh Mambang Mit dan jajarannya.

¹ Baca selengkapnya dalam Deny Rendra, 2012. Dinamika Pergerakan Kekuasaan Politik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau Tahun 2004-2009. Tesis Pascasarjana Ilmu Politik-Universitas Riau.

² *Ibid.*

Dari kasus itu semakin mempertegas pendapat Surbakti di atas bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominannya peran pemimpin partai daripada keadautan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya faktor figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan pengurus serta aktivis partai politik.

METODE

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis dua masalah. Penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dalam hal ini mengenai Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Konsolidasi Internal DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Pasca Pilkada Riau Tahun 2013).

Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca Pilkada Riau tahun 2013 dan mundurnya Mambang Mit dari kursi kepemimpinan DPD Demokrat Riau, Achmad kurang mampu untuk memerankan dan membentuk faksi yang lebih solid di partai. Gerbong Mambang Mit dan loyalis Tamsir yang kemudian mengikuti Achmad

dinilai banyak pihak menjadi kekuatan inti di DPD Demokrat Riau. Keberhasilan Achmad merebut perahu Demokrat pada Pilkada Riau tahun 2013 turut menggoyahkan peran orang-orang yang selama ini selalu berada di bawah bayang-bayang Mambang Mit adalah bukti adanya kemungkinan muncul faksi baru yang mampu menandingi faksi Mambang. Posisinya sebagai Plt ketua DPD Demokrat Riau saat ini mampu menarik faksi-faksi lain di partai yang lebih cair sifatnya.

Komunikasi Politik di Internal

Komunikasi politik DPP-DPD-DPC Partai Demokrat Provinsi Riau pasca Pilkada tahun 2013 tidak lepas dari agenda persiapan partai menghadapi Pemilu 2014. Komunikasi politik yang dibangun adalah dengan melakukan rapat koordinasi antar struktur partai Demokrat yang diinisiasi oleh DPP Partai Demokrat. Akan tetapi sebagaimana penjelasan di atas, rapat koordinasi itu kurang diminati oleh DPC-DPC karena faktor kekecewaan terhadap keputusan partai. Pada akhirnya kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara struktural lebih mengedepankan pendekatan komunikasi elit yang dilakukan oleh Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

Ketidaksesuaian kebijakan antara yang diinginkan oleh arus bawah dengan keputusan yang ditetapkan oleh elit di tingkat pusat (DPP) berakibat pada “mandek”nya komunikasi politik terutama pada upaya Partai Demokrat memenangkan Achmad – Masrul sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Pilkada tahun 2013. Memang posisi struktur Partai di tingkatan bawah sangat dilematis sebab pola yang dibangun adalah sentralisasi partai sehingga apabila arus bawah tidak sejalan dengan DPP maka struktur di arus bawah itu akan diganti dengan orang-orang yang loyal dengan DPP. Kondisi itu tentu saja menunjukkan kurangnya komitmen elit partai terutama di tingkat pusat dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal.

Konsensus Internal

Pasca Pilkada Provinsi Riau tahun 2013, DPD Partai Demokrat Provinsi Riau menghadapi

masalah internal, yaitu institusionalisasi partai. Masalah itu tentu sebagaimana uraian di atas berkaitan dengan banyak hal, mulai dari kaderisasi, komitmen kepengurusan, penguatan struktur partai hingga komunikasi antar struktur partai. Berangkat dari persoalan itu, konsensus internal kepengurusan dalam bahasan ini juga tidak dapat lepas dari bahasan di atas.

Pasca Pilkada Provinsi Riau tahun 2013, Partai Demokrat dihadapkan pada ujian berat yakni menghadapi Pemilu 2014. Kondisi internal partai yang keropos pasca mundurnya Mambang Mit dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau masih menyisakan banyak persoalan. Jaringan partai yang terbentuk waktu itu merupakan hasil kerja keras Mambang Mit dan pengurus DPD Partai Demokrat Riau sehingga dengan mundurnya Mambang Mit dari posisi Ketua DPD Demokrat Riau persoalan keteguhan sikap pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau menjadi pertanyaan banyak pihak.

Kondisi itu memang benar adanya, mundurnya Mambang Mit dari posisi Ketua DPD Demokrat Riau menyurutkan langkah sebagian besar pengurus DPD Partai Demokrat Riau yang dianggap sebagai “orang Pak Mambang” dari aktivitas partai. Memang secara lisan dan tertulis belum disampaikan sikap untuk mundur dari aktifitas partai, namun dari sisi keaktifan dalam kegiatan partai sudah menunjukkan gejala-gejala ketidaksepahaman dengan ditunjuknya Achmad sebagai Plt. Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau. Terkait dengan komitmen pengurus partai itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau Dr. Koko Iskandar mengungkapkan bahwa Plt. Ketua DPD Demokrat Riau menekankan pengurus DPD Partai Demokrat untuk menandatangai nota komitmen pengurus sebagai wujud loyalitas pengurus kepada partai.

Konsolidasi internal DPD Partai Demokrat Riau pasca Pilkada Provinsi Riau tahun 2013 dihadapkan pada masalah komitmen dan loyalitas pengurus DPD Partai Demokrat Riau. DPD Partai Demokrat Riau telah berupaya mengikat pengurus itu melalui penandatanganan nota komitmen dan pakta integritas namun karena kewenangan Plt masih terbatas maka Plt Ketua tidak dapat melakukan perombakan kepengu-

rusan DPD Partai Demokrat Riau pasca Pilkada tahun 2013.

Sumber Daya Manusia (Pengurus/Kader)

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua Partai Politik di Provinsi Riau adalah tidak adanya data base partai sehingga jumlah kader dan anggota partai tidak terdeteksi. Persoalan itu juga dihadapi oleh Partai Demokrat Provinsi Riau sebagai partai berbasis massa yang mestinya memiliki biodata kader. Dari aspek ini memang Partai Demokrat dibenturkan pada masalah mendasar yakni ketiadaan prosedur dan model identifikasi jumlah anggota dan kader partai.

Satu-satunya cara mengetahui besar kecilnya dukungan terhadap partai adalah dengan melihat hasil Pemilu. Namun demikian, sederhananya jumlah kader Partai Demokrat itu diwakili dengan jumlah pengurus pada tiap tingkatan struktur partai yang terdiri 138 orang yang tersebar di 12 DPC Partai Demokrat. Tentu saja metoda itu menunjukkan bahwa partai secara kelembagaan lemah karena tidak adanya data pasti terkait jumlah kader dan anggota partai.

Data base kader sebagai salah satu aspek melihat ketangguhan partai demokrat jelas tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, aspek ini dinilai lemah dan kondisi tidak adanya data base kader partai itu menyebabkan partai demokrat tidak memiliki angka statistik kader partai. Pernyataan di atas memperkuat argumentasi bahwa pelembagaan Partai Demokrat dilihat dari aspek pendataan kader dinilai masih lemah. Kondisi itu seolah sejalan dengan kurang optimalnya fungsi kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat Riau sebagaimana penjelasan berikut.

Kaderisasi di DPD Demokrat Riau hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembekalan kepada Calon Anggota Legislatif. Padahal pelatihan dan pembekalan kepada Caleg bukanlah bentuk kaderisasi. Kaderisasi harus berjalan berkesinambungan mulai dari tingkat bawah (dasar), menengah dan tingkat atas. Namun DPD Demokrat Riau belum menyelenggarakan kegiatan kaderisasi sebagaimana yang berkesinambungan itu, kondisi itu tentu semakin

mempertegas bahwa Partai Demokrat Riau belum kuat dari sisi pembentukan kader yang loyal, tangguh dan militan. Kondisi demikian juga tidak lepas dari tidak adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kegiatan kaderisasi dari DPP Partai Demokrat.

Berkaitan dengan hal itu, Ibnu Hazairini, SE Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Riau mengungkapkan bahwa mekanisme kaderisasi yang belum jelas dari DPP Partai Demokrat menjadi salah satu penyebab belum adanya kegiatan kaderisasi di daerah-daerah. Selain itu, karena Partai Demokrat menganut sistem partai terbuka juga dipandang sebagai salah satu penyebab tidak berjalannya kaderisasi di Partai Demokrat termasuk DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

Kaderisasi sebagai agenda politik partai belum berjalan di internal Partai Demokrat. Padahal kaderisasi sebagai agenda politik merupakan upaya partai politik untuk membangun konsolidasi politik baik secara internal maupun eksternal. Agenda politik internal lebih bersifat upaya pemberdayaan dan pembinaan organisasi dan para anggota/kader serta upaya penggembangan bagi calon-calon pemimpin bangsa.³ Apabila struktur, interaksi, dan budaya organisasi dirasa tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan politik, revitalisasi organisasi perlu dilakukan. Sementara itu, pengembangan secara eksternal dilakukan dengan terus menerus meng-evaluasi dukungan publik. Karena pesaing politik (partai politik lain) juga melakukan hal sama. Sehingga untuk mengurangi resiko kehilangan dukungan publik, partai politik perlu merancang pengembangan basis dukungan masyarakat luas.⁴

Akselerasi Pembentukan Struktur Partai

Setelah pemberahan kantor sebagai bentuk tertib administrasi, DPD partai Demokrat lebih lanjut melakukan roadshow ke daerah-daerah guna melihat kesiapan DPC-DPC menghadapi Pemilu 2014. Agenda roadshow itu digagas oleh

Plt. Ketua DPD Partai Demokrat juga sebagai upaya memastikan bekerjanya struktur partai di tingkat bawah dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu 2014. Terkait dengan agenda pembentukan struktur partai itu,

Pembentukan struktur partai telah dilakukan semasa kepemimpinan HR. Mambang Mit dalam masa persiapan menghadapi verifikasi partai politik. Terbentuknya struktur partai itu tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Partai Demokrat karena banyak partai dihadapkan pada masalah pembentukan struktur partai di tingkat bawah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan). Oleh sebab itu, salah satu yang menjadi modal bertahannya Partai Demokrat dari konflik kepentingan di tingkatan elit adalah dengan kelengkapan struktur partai itu.

Dengan kelengkapan-kelengkapan struktural itu memungkinkan organisasi partai untuk bekerja secara optimal dalam membumikan ideologi partai serta pelaksanaan kebijakan partai dapat digerakkan secara serempak dan menyeluruh. Karena itu, Diamond dan Gunther memaknai struktur sebagai perangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin, sehingga keutuhan organisasi akan sangat ditentukan oleh keberadaan struktur itu secara hierarkhi. Demikian halnya dalam konteks institionalisasi Partai Demokrat Provinsi Riau, terbentuknya struktur partai sampai pada tingkatan yang paling bawah memudahkan alur komunikasi dan koordinasi sehingga secara struktur, institionalisasi Partai Demokrat Riau dipandang kuat.

SIMPULAN

Pelembagaan (institusionalisasi) Partai Demokrat di Provinsi Riau belum berjalan dengan baik. Paling tidak dari tiga ciri institusionalisasi sebagaimana yang diungkapkan Diamond dan Gunther, yaitu *pertama* menyangkut keutuhan internal (kohesifitas internal), dapat disimpulkan bahwa keutuhan internal terganggu oleh adanya faksi-faksi dalam internal kepengurusan DPD Partai Demokrat. Hal itu diperberat dengan komunikasi politik yang “mampet (tersumbat)” antar struktur partai sehingga berdampak pada mandeknya kaderisasi. Tidak berjalannya kaderisasi itu tentu berpengaruh pada ciri yang kedua

³ Firmansyah, 2010. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor: Jakarta, hal 302-303

⁴ *Ibid.*, hal 303

yaitu ketangguhan partai. Loyalitas dibangun bukan pada loyalitas partai melainkan loyalitas kepada elit sehingga ketika terjadi sirkulasi elit maka turut menyurutkan loyalitas kader tersebut.

Selain itu, lemahnya ciri yang kedua ini juga ditandai oleh belum adanya data base kader Partai Demokrat. Data base kader mutlak diperlukan dalam rangka memetakan kekuatan partai dan membangun strategi partai menghadapi kontestasi politik baik politik skala lokal maupun nasional. Belum optimalnya pelembagaan Partai Demokrat Provinsi Riau juga ditunjukkan pada ciri yang ketiga yaitu identitas politik partai. Tidak adanya “tag line”/jargon kampanye Partai Demokrat pada skala lokal menunjukkan bahwa Partai Demokrat lemah dalam membangun identitas politik partai. Selain itu, dalam penugasan kader juga demikian. Memang pola rekrutmen kader Partai Demokrat dalam penjaringan Caleg misalnya bersifat terbuka akan tetapi kader mesti mendapat prioritas terutama kader-kader yang telah “bertungkus rumus” membesarkan partai. Lemahnya identitas politik partai demokrat justru diperlihatkan oleh Partai Demokrat dari aspek penugasan ini dengan banyaknya kandidat yang berasal dari luar partai sehingga memicu kegaduhan dari kader-kader internal Partai Demokrat.

DAFTAR RUJUKAN

- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Eddy Wibowo dkk, 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. YPAPI: Yogyakarta.
- Efriza, 2012. *Political Explore*, Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah, 2010. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Giovanni Sartori, 1976. *Parties and Party System: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: CT. Yale University Press.
- Ichlasul Amal, 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Larry Diamond & Richard Gunther, 2001. *Political Parties and Democracy*, London: The John Hopkins University Press.
- Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. 2006. *Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization*. London: Sage
- Miriam Budiardjo, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Paul Sinlaeloe, 2008. *Parpol dan Pelaksanaan Pendidikan Politik*. Sumbawa News. Com
- Ramalan Surbakti, 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Ramlan Surbakti. 2002. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo
- Richard. S Katz, dan William Crotty (editor)., 2006, *Hand Book of Party Politics*, London: Sage
- Roger F. Soltau, 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, Green and Co
- Seta Basri, 2011. *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Indiebookcorner
- Sigmun Neumann. “Modern Political Parties”, dalam *Comparative Politics: A Reader*, dedit oleh Harry Eckstein dan David E Apter. London: The Free Press of Glencoe, 1963
- Usman Ali, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan-Kebijakan*. Bandung: Grapindo.